

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN KOMITMEN
ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

REFNALDI
2007/88773

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Nama : Refnaldi
Nim/BP : 88773/2007
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, 13 Februari 2011

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi

Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Komitmen Organisasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Nama : Refnaldi
BP/NIM : 2007/88773
Fakultas : Ekonomi

Padang, 13 Februari 2011

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	1. _____
2. Sekretaris	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	2. _____
3. Anggota	: Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	3. _____
4. Anggota	: Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	4. _____

ABSTRAK

Refnaldi : Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Komitmen Organisasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pembimbing : I. Lili Anita SE, M.Si, Ak

II. Fefri Indra Arza SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) Pengaruh Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. (2) Pengaruh Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (3) Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dari penelitian ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Sampel ditentukan berdasarkan metode *judgment sampling*, sebanyak 4 Kota dan setiap kota diambil 20 orang sebagai responden. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuisioner kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data dengan menggunakan regresi berganda dengan uji t

Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. (2) Akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. (3) Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam penelitian ini disarankan agar Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah lebih meningkatkan Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif. Untuk penelitian selanjutnya, apabila peneliti juga menggunakan kuisioner yang sama sebaiknya pernyataan pada kuisioner dimodifikasi dengan pernyataan negatif, agar benar-benar menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada praktek atau penerapan yang ada dilapangan. Selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas sampel dan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat dengan pengelolaan keuangan daerah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Komitmen Organisasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah". Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah kota Padang, Padang Panjang, Bukit Tinggi dan Payakumbuh yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini.
5. Kedua orang tua (Rifidal dan Nurmanelli) yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan agar penulis dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
6. Adik-adik (Ria, Fikri, Rahma, dan Rahmi) yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama kuliah dan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP khususnya angkatan 2007 terima kasih atas dukungan moril dan materil kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL	
SURAT PERNYATAAN	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	9
D. Perumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10

Bab II. KAJIAN TEORI. KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori	12
1. Pengelolaan Keuangan Daerah	12
a. Perencanaan Keuangan Daerah	11
b. Pelaksanaan Keuangan Daerah.....	14
c. Pelaporan Keuangan Daerah	16
d. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	17
e. Pengawasan Keuangan Daerah	18
2. Transparansi	19
a. Pengertian	19
b. Prinsip-prinsip Transparansi	20
3. Akuntabilitas	21
a. Pengertian Akuntabilitas	21
b. Prinsip-prinsip Akuntabilitas.....	22
c. Bentuk-bentuk Akuntabilitas.....	22
4. Komitmen Organisasi	26
a. Pengertian Komitmen Organisasi.....	26
b. Konsep Komitmen Organisasi.....	31
5. Penelitian yang Relevan	32
6. Hubungan Antar Variabel.....	32
B. Kerangka konseptual	35
C. Hipotesis	36

BAB III. METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Populasi dan Sampel	38
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Variabel Penelitian	40
1. Variabel Terikat (Y)	40
2. Variabel Bebas (X)	41
F. Instrumen Penelian.....	41
G. Uji Validitas dan Reliabilitas	43
1. Uji Validitas	43
2. Uji Reliabilitas	44
H. Uji Asumsi Klasik	45
1. Uji Normalitas	45
2. Uji Multikolinearitas.....	45
3. Uji Heterokedastisitas	46
I. Model dan Teknik Analisis Data	46
1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	46
2. Analisis Regresi Berganda.....	46
3. Uji F	47
4. Uji t.....	47

J. Definisi Operasional	48
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	50
B. Demografi Responden	51
1. Karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin.....	51
2. Karakteristik Responden berdasarkan jenjang pendidikan.....	51
3. Karakteristik Responden berdasarkan masa kerja.....	51
C. Deskripsi Hasil Penelitian	53
1. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	53
2. Transparansi	54
3. Akuntabilitas	55
4. Komitmen Organisasi.....	57
D. Uji Validitas dan Reliabilitas	58
1. Uji Validitas.....	58
2. Uji Reliabilitas.....	58
E. Uji Asumsi Klasik.....	59
1. Uji Normalitas Residual	59
2. Uji Multikolinearitas.....	60
3. Uji Heterokedastisitas.....	61
F. Hasil Analisis Data.....	62
1. Koefisien Determinasi	62
2. Model Analisis.....	63

3. Uji F.....	65
G. Pengujian Hipotesis (Uji t).....	65
H. Pembahasan.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Keterbatasan Penelitian	72
C. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar kantor DPKD pada Prov. Sumatera Barat.....	39
2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	42
3. Hasil uji validitas <i>pilot test</i>	44
4. Hasil uji reliabilitas <i>pilot test</i>	44
5. Tingkat pengembalian Kuesioner.....	50
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
7. Jumlah Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	52
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat usia.....	52
9. Distribusi Frekuensi Pengelolaan Keuangan Daerah	53
10. Distribusi Frekuensi Transparansi.....	54
11. Distribusi Frekuensi Akuntabilitas.....	55
12. Distribusi Frekuensi Komitmen Organisasi.....	57
13. Uji Validitas.....	58
14. Uji Reliabilitas.....	59
15. Uji Normalitas.....	60
16. Uji Multikolinearitas.....	61
17. Uji Heterokedastisitas.....	62
18. <i>Adjusted R Square</i>	63

19. Koefisien Regresi.....	63
20. Uji F Hitung.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual Penelitian	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Permohonan Mengisi Kuesioner.....	76
2. Kuesioner Penelitian	77
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas <i>Pilot Test</i>	81
4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian.....	89
4. Uji Asumsi Klasik.....	97
5. Uji Model.....	98
6. Uji Hipotesis.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas, dan bertanggung jawab pada daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dengan berdasarkan undang-undang tersebut juga telah melahirkan nuansa baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintah yang sentralis birokratik ke pemerintah yang desentralik partisipatoris (Mardiasmo, 2006).

Otonomi daerah yang seluas-luasnya yang dilaksanakan tahun 2001 membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan daerah, termasuk reformasi pengelolaan keuangan daerah. Paling tidak ada dua alasan mengapa reorientasi di bidang ini diperlukan yaitu: (1) pelimpahan wewenang dan urusan kepada daerah akan mengakibatkan pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin kompleks, dan (2) tuntutan publik akan pemerintahan yang baik (*good governance*) memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, baik pada tahapan penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2006). Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi

dengan sejauhmana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan akuntabilitas sebagaimana yang diamanatkan oleh kedua undang-undang tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Ahmad, 2009)

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pemisahan dan merupakan satu kesatuan. Dalam otonomi daerah, masalahnya bukan hanya pelimpahan wewenang dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya (Ahmad, 2009).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam pasal 4 dikatakan pula bahwa, pengelolaan

keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dalam. Keberhasilan dari penerapan Permendagri ini dapat tercapai jika pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan benar, karena permendagri ini hanyalah pedoman untuk pengelolaan keuangan daerah, pedoman dikatakan berhasil jika penerapan dari pedoman itu dapat dilakukan atau diterapkan, dan pedoman dikatakan tidak berhasil dikarenakan pedoman tersebut tidak dijalankan. Amar (2009).

Secara umum keberhasilan penerapan Permendagri No. 59 Tahun 2007 ditunjukkan oleh kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing melalui peningkatan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk faktor-faktor produksi dan keadilan. Disamping faktor produksi dan keadilan, masih terdapat beberapa faktor yang juga dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu regulasi, komitmen organisasi, sumber daya manusia, dan perangkat pendukung. (Amar 2009)

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007). Dalam perkembangannya, era reformasi dan otonomi daerah telah ikut mempengaruhi perubahan paradigma pengelolaan maupun laporan keuangan pelaporan keuangan daerah secara signifikan. Pemerintah daerah sekarang mendapat amanat untuk mengelola dana publik dengan tujuan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dalam berbagai bidang atau urusan. Sebelum masa otonomi, aturan pemerintah daerah membuat laporan keuangan tidak seketat sekarang. Pengelolaan keuangan daerah saat ini tidak saja harus mengalokasikan dana publik bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat daerah, tetapi juga harus mengelola dana publik tersebut sesuai dengan UU dan aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Kepatuhan terhadap UU dan aturan dalam pengelolaan keuangan daerah diperiksa institusi pemeriksa internal daerah (Bawasda) maupun pemeriksaan eksternal (BPK).

Sejak diberlakukannya PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 terdapat paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Paradigma tersebut adalah menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatuhan serta manfaat bagi masyarakat. Pada kondisi ini, masyarakat dipandang tidak lagi sekedar obyek pembangunan tetapi berperan sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan. (Halim, 2007).

Menurut Mardiasmo (2002) transparansi adalah keterbukaan dalam proses penganggaran, penyusunan, dan pelaksanaan keuangan daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan hubungan pemerintah daerah dengan

masyarakatnya sehingga tercipta pengelolaan keuangan daerah yang bersih, efektif, efisien, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2002).

Menurut Aheruddin (2008), dengan diterapkannya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka akan meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah (yang tertuang dalam APBD) dan benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Menurut Robins (1996) komitmen organisasi adalah suatu tingkat keyakinan sejauhmana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannya berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Jadi keterlibatan kerja yang tinggi berarti pemihakkan seseorang pada pekerjaannya yang khusus, dan komitmen organisasi yang tinggi berarti pemihakkan pada organisasi yang mempekerjakannya. Dalam Azhar (2008) regulasi, komitmen organisasi, sumber daya manusia dan perangkat pendukung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan Permendagri No. 13 Tahun 2006 UU tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, berhasilnya pedoman pengelolaan keuangan daerah terlihat dari pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan benar.

Gusti (2010) rendahnya realisasi kegiatan di lingkungan Pemko Padang tampaknya harus berdampak pada realisasi anggaran tahun 2010, dari target realisasi anggaran 55%, yang baru terealisasi 8,92%. Pemko masih kebingungan untuk menutupi sisa defisit anggaran Rp 70 miliar, sebelumnya defisit kota padang Rp. 290 miliar.

Gusriyono (2010) memaparkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah Sumbar lebih buruk dari sebelumnya. Laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumbar tahun anggaran 2009 dinyatakan *disclamer* (tidak memberikan pendapat). Ini menunjukkan penurunan predikat dari wajar dengan pengecualian (WDP) pada tahun sebelumnya. Menurut laporan BPK, terdapat 23 item yang menyebabkan LKPD Sumbar 2009 berpredikat *disclamer*. Rinciannya 18 item untuk poin-poin pengecualian dan 5 item untuk pembatasan ruang lingkup pemeriksaan. Poin-poin pengecualian itu antara lain, penggunaan langsung atas pendapatan retribusi pelayanan kesehatan (Jamkesmas) sebesar Rp803,5 juta dan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp278,2 juta untuk belanja barang dan belanja modal yang menyebabkan laporan realisasi anggaran (LRA) tahun 2009 tidak disajikan berdasarkan asas bruto sebagaimana yang diisyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, untuk modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp11.2 miliar juga dinilai tidak wajar karena realisasi sebesar Rp2,9 miliar penganggarnya tidak

sesuai standar akuntansi pemerintahan. Kemudian terdapat aset lainnya berupa tanah yang diklaim pihak ketiga, sebesar Rp21,9 miliar. Tanah seluas 14.262 m² milik h Nurli tersebut sudah jatuh putusan amar pengadilannya, bukan lagi hak Pemprov. Namun masih dihitung sebagai aset pemerintah provinsi. Selanjutnya, untuk poin-poin pembatasan ruang lingkup pemeriksaan lima item tersebut, antara lain terdapat tanah-tanah yang belum tercatat, yaitu pada tanah seluas 7.657.124 m² yang sebagian besar sudah diserahkan kepada masyarakat.

Hasil pemeriksaan BPK tersebut membuktikan adanya ketimpangan dari perencanaan hingga pelaporan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah Sumatera Barat. Seharusnya dengan adanya transparansi, akuntabilitas dan komitmen organisasi pemerintah daerah dapat memberikan wujud pengelolaan keuangan daerah yang baik. Namun realitasnya di lapangan pemerintah belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan antara penjelasan pada teori dengan pelaksanaannya dilapangan.

Adapun penelitian yang melihat pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah belum banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Peneliti yang pernah melakukan penelitian ini diantaranya adalah Widya (2009) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan penelitian mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan yang melakukannya yakni Azhar (2008) regulasi, komitmen organisasi, sumber daya manusia dan perangkat pendukung mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan Permendagri No. 13 Tahun 2006 UU tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berhasilnya pedoman pengelolaan keuangan daerah terlihat dari pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan benar.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada tiga variabel independen, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan komitmen organisasi. Sebagai variabel dependen adalah pengelolaan keuangan daerah. transparansi, akuntabilitas, dan komitmen organisasi diduga berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pengaruh independensi, akuntabilitas, dan komitmen organisasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Komitmen Organisasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diketahui terdapat berbagai permasalahan. Untuk itu penulis mengemukakan identifikasi masalah yaitu:

1. Sejauhmana pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah?
2. Sejauhmana pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah?

3. Sejauhmana pengaruh desentralisasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah?
4. Sejauhmana pengaruh demokratisasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah?
5. Sejauhmana pengaruh regulasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah?
6. Sejauhmana pengaruh komitmen organisasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah?
7. Sejauhmana pengaruh sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah?
8. Sejauhmana pengaruh perangkat pendukung terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah?

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, hanya pada: Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Komitmen Organisasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang:

1. Sejauhmana pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah?

2. Sejauhmana pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah?
3. Sejauhmana pengaruh komitmen organisasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang:

1. Pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Pengaruh komitmen organisasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Komitmen Organisasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Bagi akademis, penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi yang akan mengadakan kajian lebih luas dalam bahasan ini.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Halim (2006), pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. berikut ini keterangan dari pengertian pengelolaan keuangan daerah:

a. Perencanaan keuangan daerah

Menurut ahmad (2004) perencanaan keuangan daerah terdiri atas:

1) Proses penyusunan APBD

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang merupakan indikator dan atau sasaran kinerja pemerintah daerah yang menjadi acuan laporan pertanggungjawaban tentang kinerja daerah. APBD memuat:

- a) Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja**
- b) Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan**
- c) Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan.**

Proses penyusunan APBD dimulai dengan menyiapkan rancangan APBD. Untuk itu pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD. Selanjutnya berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD tersebut pemerintah daerah menyusun strategi dan prioritas APBD. Jika Strategi dan prioritas APBD telah disusun dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, pemerintah daerah menyiapkan rancangan APBD.

2) Proses penetapan APBD

Proses selanjutnya setelah penyusunan APBD adalah penetapan APBD. Untuk penetapan ini kepala daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Rancangan APBD yang disampaikan kepala daerah tersebut dapat di setujui atau tidak disetujui oleh DPRD. Jika rancangan APBD tidak disetujui DPRD, maka pemerintah daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut. Selanjutnya penyempurnaan rancangan APBD tersebut harus disampaikan kembali ke DPRD. Jika rancangan APBD sudah disempurnakan tersebut tidak disetujui lagi, maka pemerintah daerah dapat menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai pegurusan keuangan daerah.

3) Perubahan APBD

Dalam perjalanannya, APBD yang telah disetujui DPRD dapat mengalami perubahan. Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir. Jangka waktu 3 bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.

Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan:

- a) Kebijakan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah yang bersifat strategis.
- b) Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan
- c) Terjadinya kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan mendesak ini adalah penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak terduga.

b. Pelaksanaan keuangan daerah

Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut. Perangkat daerah tersebut adalah orang/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah (Ahmad, 2004).

Dalam pelaksanaan keuangan daerah, semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga, dan jasa dari penjualan, pengadaan barang atau jasa, penyimpanan uang daerah, dan penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD. Pendapatan daerah disektor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dan

ditempatkan dalam lembaran daerah. tindakan yang dimaksud tidak termasuk penerbitan surat keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apabila rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD.

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang. Surat Keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD.

Pembebanan APBD tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Bukti yang dimaksud adalah kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, serta perjanjian pengadaan barang dan jasa. Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, serta bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Penggunaan keuangan daerah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk untuk melaksanakan pengeluaran. Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan surat perintah membayar. Surat perintah membayar merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD. Surat perintah membayar ditetapkan oleh bendahara umum daerah. bendahara umum daerah membayar berdasarkan surat perintah membayar. Bendahara umum daerah dapat menetapkan pejabat yang melakukan tugas pembayaran atas dasar surat perintah membayar.

c. Pelaporan keuangan daerah

Menurut Halim (2007), pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan. Komponen laporan keuangan tersebut setidaknya-tidaknya terdiri dari:

- 1) Laporan realisasi anggaran, yaitu laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode.
- 2) Neraca, yaitu laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada satu tanggal tertentu.
- 3) Laporan arus kas, yaitu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar selama satu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
- 4) Catatan atas laporan keuangan, yaitu bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan sector publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik (baik dari pajak, retribusi, atau transaksi lainnya). Agar laporan tersebut dapat dimengerti dan disajikan sesuai ketentuan, maka diperlukan suatu standar akuntansi yang diterima umum (Halim, 2007)

d. Pertanggungjawaban keuangan daerah

Menurut Ahmad (2004), untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai:

- 1) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pokok-pokok pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi.
- 2) Kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi.

Laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut dinyatakan dalam satu bentuk laporan. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah terdiri atas:

- 1) Laporan Perhitungan APBD
- 2) Nota Perhitungan APBD
- 3) Laporan aliran kas
- 4) Neraca daerah

Setiap pejabat pengelola keuangan daerah menyusun laporan tertanggungjawaban keuangan secara periodik. Sistem dan prosedur pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan keputusan kepala daerah

DPRD dalam sidang pleno terbuka menerima atau menolak dengan meminta untuk menyempurnakan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. penolakan laporan oleh DPRD harus disertai dengan alasannya. Proses lebih lanjut dari penolakan pertanggungjawaban kepala daerah tersebut mengikuti mekanisme sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang pemerintah daerah. laporan pemerintah daerah merupakan dokumen daerah.

e. Pengawasan keuangan daerah

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan yang menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan keuangan daerah adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan-pengumpulan pendapatan, pembelanjaan, pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan (Halim, 2007). Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan pengawasan bukanlah suatu kegiatan yang semata-mata ditujukan untuk mencari kesalahan. Tujuan utama pengawasan adalah untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sesungguhnya terjadi dalam rangka pencapaian tujuan. Menurut Halim (2007), tujuan pengawasan keuangan dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menjamin keamanan
- 2) Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah
- 3) Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi, dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah

2. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Menurut Abdul (2002) transparansi diartikan sebagai keterbukaan pemerintah (*openes*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (hafiz, 2008)

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002) transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Lutfi (2003) mengemukakan bahwa pemerintah dikatakan transparan jika:

- 1) Pemerintah melakukan pertanggungjawaban secara rutin kepada rakyat/DPRD mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya.
- 2) Pemerintah dengan senang hati memberikan informasi seluas mungkin mengenai kinerjanya baik masalah pelayanan pada rakyatnya maupun masalah keuangan.
- 3) Pemerintah dengan terbuka selalu mengadakan dialog dengan rakyat secara rutin maupun dengan rakyatnyasecara rutin maupun insidental mengenai seluruh produk kebijakan yang telah dan dilaksanakan

Mardiasmo (2003) mengemukakan bahwa kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari:

- 1) Adanya sistem pelaporan keuangan
- 2) Adanya sistem pengukuran kinerja
- 3) Dilakukannya auditing sektor publik
- 4) Berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*).

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan apabila memenuhi kinerja kriteria sebagai berikut (Mardiasmo, 2003):

- 1) Terdapatnya pengumuman kebijakan anggaran
- 2) Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses
- 3) Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- 4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat
- 5) Terdapatnya sistem pengendalian informasi kepada publik

b. Prinsip-prinsip Transparansi

Menurut Mardiasmo (Widya , 2009) Prinsip transparansi dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut :

- 1) Pengumuman atau pemberian informasi oleh pemerintah daerah berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusun,
- 2) Kemudahan dokumen-dokumen kebijakan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk diketahui oleh publik,
- 3) Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban,

- 4) Kemampuan transparansi anggaran dalam meningkatkan dan mengakomodasi usulan masyarakat,
- 5) Adanya sistem penyampaian informasi anggaran kepada public.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu (*right to be informed*) dan untuk idengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

3. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengeahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Hafiz, 2008)

Menurut Mahsun (2006), akuntabilitas public terdiri dari atas dua macam, yaitu: (1) akuntabilitas vertical dan (2) akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal

adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah pusat atau MPR. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

b. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Menurut LAN dalam akuntabilitas dan good governance (2001), dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

c. Bentuk-bentuk Akuntabilitas

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Mahsun (2006), menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1) Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah di daerah. Berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pihak eksekutif dan kemudian dipertanggungjawabkan kepada pihak legislatif. Akuntabilitas akan muda dilaksanakan jika sejak awal masyarakat sudah dilibatkan dalam proses perencanaan kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang ditetapkan tersebut sejalan dengan kepentingan publik.

2) Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertanggungjawaban terhadap program-program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Audit terhadap akuntabilitas program, disamping memeriksa apakah program yang direncanakan pemerintah telah sesuai dengan yang direncanakan, juga terkait dengan apakah program-program tersebut telah dirancang dengan mempertimbangkan konsep *Value for money*. Hal ini sangat perlu untuk menghindari pemborosan dan pengalokasian anggaran pada program-program yang tidak strategis bagi masyarakat dan daerah.

3) Akuntabilitas Proses (*Proses Accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

Setiap dana yang dialokasikan harus melalui suatu proses atau prosedur yang jelas dan pasti. Pemerintah daerah tidak bisa begitu saja mengalokasikan dana yang ada dalam APBD tanpa melalui prosedur dan proses yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4) Akuntabilitas Hukum dan Peradilan (*Accountability For Probity and Legality*)

Setiap penggunaan dana publik harus didasarkan atas hukum dan peraturan yang melandasinya. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menarik sumber dana dan mengalokasikannya tanpa didasari landasan hukum dan peraturan yang sering digunakan daerah disamping berupa Peraturan Daerah juga berupa Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah ditingkat yang lebih tinggi. Pada era otonomi semua bentuk pengalokasian dana anggaran daerah harus dinyatakan dalam Peraturan Daerah berupa Pedoman Penyusunan APBD, struktur anggaran daerah, dll. Untuk menjamin agar setiap penggunaan dana dilandasi atas peraturan dan hukum yang berlaku, maka diperlukan audit kepatuhan (*compliance audit*).

d. Kendala Akuntabilitas

Menurut Mahsun (2006:97), dalam mengimplementasikan akuntabilitas pada umumnya menemui kendala yang justru bisa menjadi *conta-productive* dalam menciptakan kesehatan dan hubungan akuntabilitas yang efektif. Beberapa hal yang menjadi kendala akuntabilitas dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Agenda atau rencana yang tidak transparan

Agenda atau rencana yang tidak transparan yang disusun secara tidak transparan akan mengarahkan organisasi dalam suatu kondisi yang hanya menguntungkan perseorangan. Taktik yang demikian hanya akan membuat karyawan akan meninggalkan tanggung jawab dan tidak termotivasi untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Taktik ini juga akan merusak kepercayaan yang sudah dibangun, dimana kepercayaan merupakan elemen kunci akuntabilitas. Jadi akuntabilitas mensyaratkan transparansi yang berarti keterbukaan.

2) *Favoritism*

Favorotism merupakan isu yang licik. Manajemen dapat saja melakukan kinerja secara lebih unggul dan meninggalkan karyawan yang mengarah pada kinerja yang kurang baik, juga membebani karyawan secara berlebih. *Favoritism* tidak mendukung inklusivitas dan kerja tim, padahal terwujudnya akuntabilitas memerlukan kedua hal tersebut.

3) Kepemimpinan yang lemah

Komitmen kepemimpinan untuk membangun suatu lingkungan yang memiliki akuntabilitas merupakan hal yang krusial. Tanpa kepemimpinan yang kuat, hasil kinerja akan kurang dari yang diharapkan.

4) Kekurangan sumber daya

Hal ini akan menjadi kurang berguna jika individu atau tim tidak didukung sumber daya untuk melaksanakan pekerjaannya. Untuk memperoleh hasil yang baik atas kinerjanya, organisasi harus melakukan investasi pada karyawan mereka.

5) *Lack of follow-through*

Ketika manajemen mengatakan bahwa mereka akan mengerjakan sesuatu dan mereka tidak akan mengerjakan sesuatu, hal ini berarti manajemen mengatakan bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk menindaklanjuti

6) Garis kewenangan dan tanggung jawab kurang jelas

Jika garis wewenang dan tanggung jawab anggota organisasi ditetapkan dengan tidak jelas maka akan sulit untuk menentukan letak akuntabilitasnya. Masalah ini akan menimbulkan pelaksanaan atas kewajiban kinerja menjadi tidak terarah. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab merupakan inti dari suatu bentuk hubungan akuntabilitas.

7) Kesalahan penggunaan data

Informasi kinerja harus lengkap dan memiliki kredibilitas serta harus dilaporkan secara tepat waktu. Dengan menggunakan data yang relevan maka akan menunjukkan kelemahan transparansi dan kepercayaan. Tanpa menggunakan data secara menyeluruh akan mendatangkan kelemahan yang kurang bermakna atas kinerja dan hal ini akan menjadikan tidak berarti bagi organisasi.

4. Komitmen organisasi

a. Pengertian Komitmen Organisasi

Menurut Robins (1996) komitmen organisasi adalah suatu tingkat keyakinan sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang

tujuannya berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Jadi keterlibatan kerja yang tinggi berarti pemihakan seseorang pada pekerjaannya yang khusus, dan komitmen organisasi yang tinggi berarti pemihakan pada organisasi yang mempekerjakannya.

Mowday (dalam Silmi, 2009) mendefenisikan komitmen organisasi sebagai sifat relative dari individu dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya dalam organisasi. Hal ini dapat dicapai dengan tiga hal, yaitu:

- 1) Penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi
- 2) Kesiapan dan kesediaan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh
- 3) Keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi

Menurut luthan (1992) sebagai suatu sikap, komitmen organisasi sering didefenisikan sebagai:

- 1) Suatu keinginan yang kuat menjadi anggota suatu organisasi tertentu
- 2) Suatu kesediaan yang tinggi menjalankan usaha atas nama organisasi
- 3) Suatu kepercayaan dan penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi

Sedangkan menurut Mathis (2001) komitmen organisasi didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan dan penerimaan tentang kerja terhadap tujuan organisasi dan mempunyai keinginan untuk tetap ada dalam organisasi tersebut. Dengan kata lain, adalah suatu sikap tentang kesetiaan karyawan kepada organisasi mereka dan suatu proses berkelanjutan dimana anggota organisasi menyatakan perhatian mereka kepada kesejahteraan dan kesuksesan organisasi selanjutnya.

Menurut Sopiah (2008) komitmen organisasi dapat disimpulkan sebagai suatu ikatan psikologis karyawan pada organisasi yang ditandai dengan adanya:

- 1) Kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi
- 2) Kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi, dan
- 3) Keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi.

Secara singkat pada intinya definisi komitmen organisasi di atas mempunyai penekanan yaitu proses pada individu (pegawai) dalam mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, dan tujuan organisasi. Disamping itu, komitmen organisasi mengandung pengertian sebagai suatu hal yang lebih dan kesetiaan yang pasif terhadap organisasi, dengan kata lain komitmen organisasi menyiratkan hubungan pegawai dengan perusahaan atau organisasi secara aktif. Karena pegawai yang menunjukkan komitmen tinggi memiliki keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggungjawab yang lebih dalam menyokong kesejahteraan dan keberhasilan organisasi tempat bekerja.

Setiap pegawai dalam organisasi harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi. Setiap orang dalam organisasi harus bertanya terlebih dahulu “*apa misi, visi, dan tujuan organisasi yang saya diharapkan mencapainya?*”. Hal ini berbeda dengan pertanyaan “*tugas apa yang diharapkan oleh organisasi untuk saya lakukan?*”. Perbedaan tersebut penting karena pencapaian tugas merupakan input, sedangkan pencapaian misi, visi, dan tujuan merupakan outcome misi, visi, dan tujuan organisasi. Pada dasarnya merupakan misi,

visi, dan tujuan bersama yang ada dalam organisasi. Manajemen berkewajiban untuk melakukan sosialisasi, komunikasi, sharing atas misi, visi, dan tujuan organisasi tersebut kepada seluruh pegawai dalam organisasi sehingga setiap pegawai memiliki komitmen untuk mencapainya (Mahmudi,2007).

Apabila setiap pegawai memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan prestasi terbaiknya bagi Negara dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, maka tentunya kinerja sektor publik akan meningkat. Untuk mencapai kinerja sektor publik yang tinggi, setiap pegawai hendaknya memiliki pertanyaan kepada dirinya sendiri “*apa yang bisa saya berikan kepada Negara dan masyarakatku?*”. Hal itu akan jauh berbeda dengan pertanyaan : “*apa yang harus aku lakukan untuk pimpinanku?*” (Mahmudi,2007).

Menurut Meyer dan Allens dalam Sopiah (2008), terdapat tiga komponen model dari komitmen organisasional:

1) Affective commitment

Pengertian affective commitment difokuskan pada penggabungan emosional yang positif sebagai suatu bagian dimana karyawan secara psikologis terkait dengan organisasi berdasarkan pada seberapa nyaman perasaannya dalam organisasi tersebut. Affective commitment merupakan proses perilaku dimana orang berfikir mengenai hubungan dengan organisasi dalam hal kesesuaian nilai-nilai individual akan secara langsung mempengaruhi keinginan individu untuk tetap bertahan dalam organisasi.

2) *Continuance commitment*

Pengertian *continuance commitment* didasarkan pada keterkaitan dalam hubungan dengan anggota-anggota dalam organisasi, sebagai bagian dimana karyawan secara psikologis terikat dengan organisasi berdasarkan biaya yang dikeluarkan (ekonomi, social, dan hubungan status) jika ia meninggalkan organisasi. Biaya yang dimaksud dimanifestasikan dalam dua hal yang berbeda. Pertama, masa kerja individu dalam organisasi yang mereka rasakan akan menumbuhkan loyalitas terutama dengan adanya program pension, senioritas, spesialisasi skill, afiliasi, dan ikatan keluarga yang akan merugikan mereka jika berpindah organisasi. Kedua, individu bisa merasakan mereka berfikir untuk tetap tinggal dalam organisasi karena tidak punya alternatif pekerjaan yang menjanjikan.

3) *Normative commitment*

Yaitu adanya keinginan karyawan untuk tetap bersama organisasi berdasarkan kewajiban atas tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini bisa berasal dari budaya individual, etika kerja yang menyebabkan mereka wajib untuk tetap bertahan dalam organisasi. Dengan demikian rasa kesetiaan terhadap tugas yang mendasari komitmen normatif karyawan mempengaruhi individu untuk tetap tinggal dalam organisasi. Komitmen pada organisasi melibatkan tiga sikap karyawan yaitu:

- 1) Keinginan karyawan untuk ikut serta dalam mewujudkan tujuan organisasi
- 2) Karyawan merasa terlibat dalam kewajiban organisasi
- 3) Adanya loyalitas karyawan yang tinggi terhadap organisasi.

b. Konsep Komitmen Organisasi

Dalam Mulhenrizal (2009) menurut Porter menyebutkan bahwa nilai komitmen organisasi dikarakteristikan dengan:

- 1) Kepercayaan, keyakinan, yang sungguh-sungguh dalam pencapaian nilai dan tujuan organisasi
- 2) Kemauan dalam berusaha dengan sekuat tenaga untuk kepentingan Organisasi

5. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah sudah pernah dilakukan oleh Widya (2009) yang menyatakan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan penelitian mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan dilakukan oleh yakni Azhar (2008) yang menyatakan bahwa regulasi, komitmen organisasi, sumber daya manusia dan perangkat pendukung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berhasilnya pedoman pengelolaan keuangan daerah terlihat dari pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan benar.

6. Hubungan Variabel

a. Pengaruh Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah harus transparans yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah dimana untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah maka prinsip ini sangat penting untuk diterapkan (Mardiasmo, 2002). Implikasi dari penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu akan dapat memenuhi keingintahuan dari anggota masyarakat dan akan mendorong peran masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga nantinya akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Widya (2009) juga menyatakan bahwa keuangan daerah yang tertuang dalam APBD diselenggarakan harus mengacu pada norma dan prinsip anggaran salah satunya adalah transparansi. Transparansi pada akhirnya akan membentuk hubungan pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga terbnentuknya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, efektif, efisien, dan reponsif terhadap aspirasi dan kepeningan masyarakat (Mardiasmo, 2002).

Transparansi berperan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Peran masyarakat berpengaruh besar untuk menjaga efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga transparansi memiliki arti yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi semakin tinggi transparansi dalam proses pengelolaan keuangan daerah maka pengelolaan keuangan daerah akan semakin efektif. Transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat mengakses proses dari pengelolaan keuangan daerah, dengan adanya hal seperti ini maka mendorong pemerintah untuk melakukan proses pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku karena masyarakat sudah memiliki peran langsung dalam pengelolaan keuangan daerah.

b. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Akuntabilitas adalah tujuan utama dari pelaporan keuangan pemerintah. Akuntabilitas meliputi informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktifitas yang dilakukan.

Menurut Aheruddin (2008), dengan diterapkannya akuntabilitas, maka akan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah (yang tertuang dalam APBD) dan benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah akan memotivasi pemerintah untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Akuntabilitas memberikan peran kepada masyarakat untuk dapat mengetahui proses dan hasil dari pengelolaan keuangan daerah sehingga secara tidak langsung masyarakat dapat berfungsi sebagai pengawas dari pengelolaan keuangan daerah tersebut. Semakin tinggi akuntabilitas dari proses pengelolaan keuangan daerah maka pengelolaan keuangan daerah akan semakin efektif.

c. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Robins (1996) komitmen organisasi adalah suatu tingkat keyakinan sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannya berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Jadi keterlibatan kerja yang tinggi berarti pemihakan seseorang pada pekerjaannya yang khusus, dan komitmen organisasi yang tinggi berarti pemihakan pada organisasi yang mempekerjakannya.

Azhar (2008) regulasi, komitmen organisasi, sumber daya manusia dan perangkat pendukung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan Permendagri No. 13 Tahun 2006 UU tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. berhasilnya pedoman pengelolaan keuangan daerah terlihat dari pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan benar.

Komitmen Organisasi yang tinggi sangat diperlukan dalam sebuah organisasi, karena terciptanya komitmen yang tinggi akan mempengaruhi situasi kerja yang profesional. Berbicara mengenai komitmen organisasi tidak bisa dilepaskan dari sebuah istilah loyalitas yang sering mengikuti kata komitmen. Adanya situasi kerja yang profesional akan berperan dalam mencapai tujuan dari instansi sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Jadi semakin tinggi komitmen organisasi maka semakin efektif pengelolaan keuangan daerah.

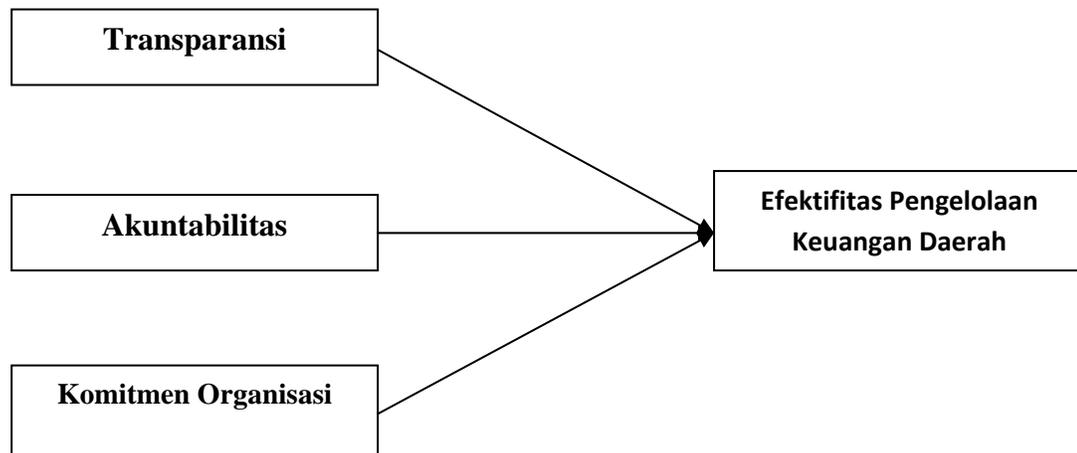
B. Kerangka konseptual

Otonomi daerah telah melimpahkan wewenang dalam pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, untuk membentuk pengelolaan keuangan yang handal maupun sesuai dengan aturan yang berlaku maka perlu memperhatikan hal-hal yang turut mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah. diantaranya yaitu transparansi, akuntabilitas, dan komitmen organisasi.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah. transparansi yakni keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah yang mana setiap warga Negara berhak mengetahui bagaimana kondisi keuangan Negara, dengan adanya transparansi maka pengelolaan keuangan daerah dapat diperhatikan ataupun diawasi oleh banyak pihak. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah sehingga terlihat jelas kemana arah keuangan daerah yang telah di kelola. Komitmen organisasi merupakan sejauhmana seseorang mampu untuk memenuhi

target dan keinginan orgnisasinya sebagaimana untuk memenuhi target yang ada pada dirinya apabila hal ini ada dalam diri pegawai maka pengelolaan keuangan daerah sedikit banyak akan memiliki beberapa pengaruh.

Berikut merupakan gambar dari kerangka konseptual pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah.



Gambar 1
Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut:

H₁ : Transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah

- H₂ : Akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah
- H₃ : Komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Komitmen Organisasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Sampel penelitian terbatas pada empat kota saja. Penelitian ini kemungkinan akan menunjukkan hasil yang berbeda jika sampel ditambah sebagai objek penelitiannya.

2. Kuisisioner yang peneliti sebarakan masih terdapat keterbatasan , karena pernyataan dalam kuisisioner menggunakan pernyataan yang normatif. Hal ini menyebabkan responden diarahkan untuk pilihan jawaban yang baik atau positif saja.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak:

1. Bagi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah disarankan untuk lebih meningkatkan Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif.
2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya tidak menggunakan kuesioner ini lagi atau apabila peneliti juga menggunakan kuisisioner yang sama sebaiknya pernyataan pada kuisisioner dimodifikasi, agar benar-benar menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada praktek atau penerapan yang ada dilapangan.
3. Selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas sampel dan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat dengan pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba
- Abdul Halim. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPPSIM YKPN
- Aheruddin. 2008. "pengelolaan keuangan daerah di era otonomi." Diakses melalui www.sumbawanews.com pada tanggal 24 november 2010
- Ahmad Yani. 2004. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajo Grafindo Persada
- Amar. 2009. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri No. 59 Tahun 2007 pada Pemerintahan Kota Banda Aceh. *Tesis Universitas Sumatera Utara*. Medan
- Azhar. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri No. 13 Tahun 2006. *Tesis Universitas Sumatera Utara*. Medan
- Gusti Ayu gayatri. 2010. *Upaya Menekan Defisit APBD*. Padang. Padang Ekspres
- Gusriyono. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah Buruk*. Padang. Padang Ekspres
- Hafiz Tanjung. 2008. Akuntansi, Transparansi, Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan). *Tesis Universitas Nasional Pasim*. Pasim
- Imam Ghozali. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2001. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Nur Indriantoro. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta:BPFE